WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

mbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Sekretaris Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sambil menunggu disahkan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;

31. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014.

32. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan :
   a. Semula — Rp.747.232.288.909,00,-
   b. Bertambah/(Berkurang) — Rp. 0,00,-
   Jumlah Pendapatan Daerah setelah Pergeseran — ***Rp.747.232.288.909,-***

2. Belanja
   a. Semula — Rp.779.472.794.437,00,-
   b. Bertambah/(Berkurang) — Rp. 0,00,-
   Jumlah Belanja Daerah setelah Pergeseran — ***Rp.779.472.794.437,00,-***

3. Pembiayaan
   Penerimaan
   a. Semula — Rp.38.240.505.528,00,-
   b. Bertambah/(Berkurang) — Rp. 0,00,-
   Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Pergeseran — ***Rp.38.240.505.528,00,-***

   Pengeluaran
   a. Semula — Rp. 6.000.000.000,00,-
   b. Bertambah/(Berkurang) — Rp. 0,00,-
   Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Pergeseran — ***Rp. 6.000.000.000,00,-***
   Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Pergeseran — ***Rp.32.240.505.528,00,-***
   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Pergeseran — ***Rp. 0,00,-***

2. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II, Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisip satu pasal yaitu Pasal *4A*, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengakibatkan Pergeseran Anggaran pada Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014.

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp.747.232.288.909,00,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00,-	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Pergeseran		***Rp.747.232.288.909,-***

2. Belanja

a. Semula	Rp.779.472.794.437,00,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00,-	
Jumlah Belanja Daerah setelah Pergeseran		***Rp.779.472.794.437,00,-***

3. Pembiayaan

Penerimaan

a. Semula	Rp.38.240.505.528,00,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00,-	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Pergeseran		***Rp.38.240.505.528,00,-***

Pengeluaran

a. Semula	Rp.6.000.000.000,00,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00,-	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Pergeseran		***Rp. 6.000.000.000,00,-***
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Pergeseran		***Rp.32.240.505.528,00,-***
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Pergeseran		***Rp. 0,00,-***

2. Lampiran I dan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisip satu pasal yaitu Pasal *4A*, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengakibatkan Pergeseran Anggaran pada Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 07 April 2014
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
Pada tanggal April 2014
SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

DASNI YUZAR
LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2014 NOMOR .....

KOTA LHOKSEUMAWE

RINGKASAN PERGESERAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	747,232,288,909.00	747,232,288,909.00	0.00	**********
1.1	Pendapatan Asli Daerah	39,364,195,053.00	39,364,195,053.00	0.00	**********
1.1.1	Pajak Daerah	17,826,750,000.00	17,826,750,000.00	0.00	**********
1.1.2	Retribusi Daerah	9,997,445,053.00	9,997,445,053.00	0.00	**********
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,040,000,000.00	3,040,000,000.00	0.00	**********
1.1.4	Zakat dan Infaq/Sadaqah	4,700,000,000.00	4,700,000,000.00	0.00	**********
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00	0.00	**********
1.2	Dana Perimbangan	565,704,559,020.00	565,704,559,020.00	0.00	**********
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62,512,359,520.00	62,512,359,520.00	0.00	**********
1.2.2	Dana Alokasi Umum	469,439,419,500.00	469,439,419,500.00	0.00	**********
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	33,752,780,000.00	33,752,780,000.00	0.00	**********
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	142,163,534,836.00	142,163,534,836.00	0.00	**********
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	**********
1.3.2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	**********
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Lainnya	11,103,349,660.00	11,103,349,660.00	0.00	**********
1.3.4	Dana Penyesuaian, Otonomi Khusus dan Migas	47,024,090,212.00	47,024,090,212.00	0.00	**********
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	84,036,094,964.00	84,036,094,964.00	0.00	**********
1.3.6	Lain-Lain Pendapatan	0.00	0.00	0.00	**********
	JUMLAH PENDAPATAN	747,232,288,909.00	747,232,288,909.00	0.00	**********
2.	BELANJA DAERAH	779,472,794,437.00	779,472,794,437.00	0.00	**********
2.1	Belanja Tidak Langsung	382,054,597,983.00	382,054,597,983.00	0.00	**********
2.1.1	Belanja Pegawai	308,177,497,983.00	308,177,497,983.00	0.00	**********
2.1.2	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	**********
2.1.3	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	**********
2.1.4	Belanja Hibah	12,071,100,000.00	12,071,100,000.00	0.00	**********
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	32,385,000,000.00	32,385,000,000.00	0.00	**********
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	0.00	0.00	0.00	**********
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan	28,421,000,000.00	28,421,000,000.00	0.00	**********
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	**********
2.2	Belanja Langsung	397,418,196,454.00	397,418,196,454.00	0.00	**********
2.2.1	Belanja Pegawai	53,020,072,743.00	53,020,072,743.00	0.00	**********
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	151,682,126,670.00	151,682,126,670.00	0.00	**********
2.2.3	Belanja Modal	192,715,997,041.00	192,715,997,041.00	0.00	**********
	JUMLAH BELANJA	779,472,794,437.00	779,472,794,437.00	0.00	**********

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS(DEFISIT)	(32,240,505,528.00)	(32,240,505,528.00)	0.00	**********
3.	PEMBIAYAAN				
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**38,240,505,528.00**	**38,240,505,528.00**	**0.00**	**********
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	37,440,505,528.00	37,440,505,528.00	0.00	**********
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	**********
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	**********
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	**********
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	**********
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	**********
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**38,240,505,528.00**	**38,240,505,528.00**	**0.00**	**********
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**6,000,000,000.00**	**6,000,000,000.00**	**0.00**	**********
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	**********
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	0.00	**********
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	**********
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	**********
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**6,000,000,000.00**	**6,000,000,000.00**	**0.00**	**********
	PEMBIAYAAN NETTO	**32,240,505,528.00**	**32,240,505,528.00**	**0.00**	**********
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**********

Lhokseumawe, 7 April 2014
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

Lampiran IV
Peraturan Walikota Lhokseumawe
Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Penjabaran APBK Lhokseumawe Tahun 2014

PERUBAHAN DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
			SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(5-4)*
5.1.5	**BELANJA BANTUAN SOSIAL**		**5.600.000.000**	**5.600.000.000**	**-**
01.24	**Sekretariat Baitul Mal**		**5.600.000.000**	**5.600.000.000**	**-**
	Bantuan Dana Untuk				
1	Belanja Zakat Tahun 2014	Kota Lhokseumawe	3.600.000.000	900.000.000	(2.700.000.000)
2	Belanja Infaq Tahun 2014	Kota Lhokseumawe	1.100.000.000	-	(1.100.000.000)
3	Kurang Bayar Zakat dan Infaq Tahun 2013	Kota Lhokseumawe	900.000.000	-	(900.000.000)
4	Belanja Kurang Bayar Zakat Tahun 2013	Kota Lhokseumawe	-	3.600.000.000	3.600.000.000
5	Belanja Kurang Bayar Infaq Tahun 2013	Kota Lhokseumawe	-	1.100.000.000	1.100.000.000
	JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL		**5.600.000.000**	**5.600.000.000**	**-**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA